



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD FITRI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **88056**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.226.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/20 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/40 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 71 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 71.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 189.250.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.750.000
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
6. LAINNYA, YAMAHA VEGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	64.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	7.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.662.943
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.516.712.943
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.306.712.943

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.